

ANALISIS PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK, LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI DIY TAHUN 2013-2022

Ismia Chienta Mahasmara Jasmine

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta

ismiachientamj@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of population density, economic growth rate and human development index on local original income in DIY Province partially and simultaneously. The data used in this research uses secondary data, namely population density, economic growth rate, human development index, and local original income available at the Yogyakarta Province Central Statistics Agency (BPS) for 2013-2022. The analytical tool used in this research uses panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach. Based on the results of the analysis, it is known that Population Density and the Human Development Index have a significant positive effect on Original Regional Income in the District/City of DIY Province in 2013-2022, while the Economic Growth Rate has a negative effect on Original Regional Income in the District/City of DIY Province in 2013-2022.

Keywords: *Original Regional Income, Population Density, Economic Growth Rate, and Human Development Index.*

ABSTRAK

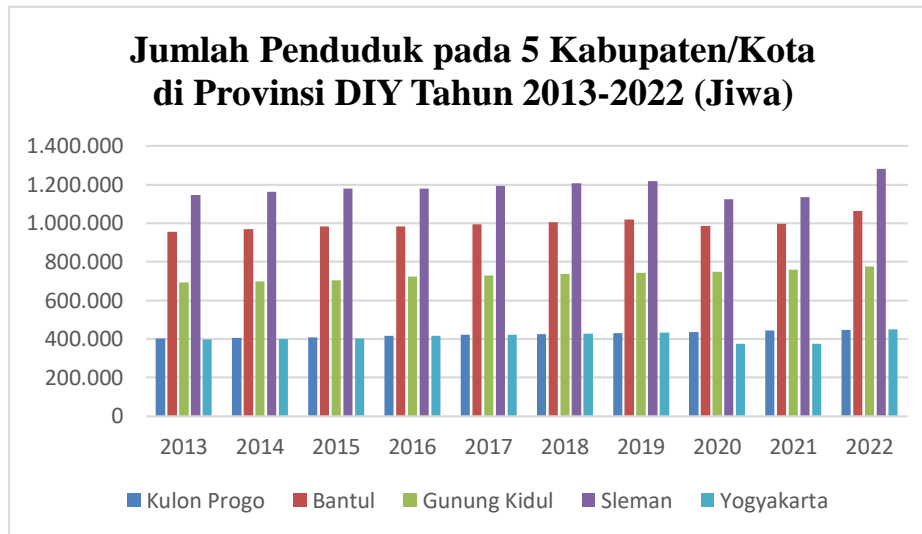
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepadatan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DIY secara parsial dan simultan. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu kepadatan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan pendapatan asli daerah yang tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY tahun 2013-2022. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Kepadatan Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2013-2022, sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2013-2022.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia.

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah otonom yang terdiri atas satu Kotamadya dan empat Kabupaten diantaranya Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta yang memiliki banyak potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri. Hal tersebut dikarenakan faktor dari predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota pelajar dan Kota pariwisata menyebabkan tinggi nya kepadatan penduduk di Kota ini.

Grafik 1



Sumber: Badan Pusat Statistika DIY

Dapat dilihat dari grafik 1 bahwa jumlah penduduk di 5 Kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2013-2022 terus mengalami kenaikan secara stabil di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul, sedangkan di Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta jumlah penduduk turun secara bersamaan yaitu di tahun 2020. Jumlah penduduk dengan rata-rata tertinggi yaitu Kabupaten Sleman sebesar 1.183.735, lalu disusul Kabupaten Bantul dengan rata-rata sebesar 995.848, kemudian Kabupaten Gunungkidul dengan rata-rata sebesar 730.919, Kabupaten Kulon Progo sebesar 423.738 serta Kota Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk terkecil dengan rata-rata 410.105.

Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk di Provinsi DIY dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dijadikan momentum bagi pemerintah daerah untuk menggali sektor potensial yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, dapat diperoleh gambaran apakah kebijakan pembangunan di suatu daerah telah berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk menetapkan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Laju pertumbuhan ekonomi dikatakan mengalami kenaikan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya dan ditandai dengan kenaikan kapasitas produksi. Dengan kata lain laju pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan skala yang diukur dengan dimensi waktu dalam perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi masyarakat bertambah sehingga mencapai kemakmuran masyarakat. Tolok ukur yang dapat dilihat untuk menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah yaitu dilihat dari angka atau tingkat produk domestik bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan produk domestik regional bruto (PDRB) untuk tingkat daerah setiap tahun (Boediono, 1999).

PDRB yang digunakan sebagai acuan dalam melihat laju pertumbuhan ekonomi yaitu PDRB konstan karena stabil akan deflasi maupun inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Nilai PDRB akan menjelaskan sampai sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga tercipta nya kesejahteraan masyarakat dinilai penting dan menjadi suatu kebutuhan dikarenakan kualitas manusia di suatu wilayah

memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di suatu daerah (Amalia dan Purbadharmaja, 2014).

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut digambarkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif, selain pendapatan nasional per kapita, untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi sebuah tolok ukur untuk melihat kesuksesan pembangunan dan angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan dimensi: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*), rata-rata lama sekolah (*mean year of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Keempat indikator tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah melalui kualitas sumber daya manusia yang baik. Ditetapkan klasifikasi IPM berdasarkan tiga kelompok. Pertama, negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah bila angka IPM berkisar antara 0 sampai 50. Kedua, negara dengan tingkat pembangunan manusia sedang jika angka IPM berkisar antara 51 sampai 79. Ketiga, negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi jika angka IPM berkisar antara 80 sampai 100 (Harahap, 2011).

Diperlukan upaya dan strategi untuk meningkatkan PAD, karena jika PAD meningkat, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan lebih baik dan teratur karena kebutuhan dana dan keperluan daerah dapat terpenuhi melalui APBD yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus & Thalib, 2010). Sehingga infrastruktur dan pembangunan di Provinsi DIY lebih maju dan berkembang. Indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi ini, memiliki hubungan yang erat. Tingkat IPM yang tinggi akan menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula, lalu di sisi lain padatnya penduduk di Provinsi DIY akan meningkatkan realisasi dari pajak daerah sehingga pada akhirnya akan tercipta angka pendapatan asli daerah yang tinggi.

Oleh karena itu, motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah untuk melihat “Analisis Pengaruh dari Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Ekonomi serta Indeks Pembangunan Manusia terhadap PAD di Provinsi DIY Tahun 2013-2022” dan untuk mengetahui variabel mana yang lebih dominan dan berpengaruh dalam mempengaruhi PAD di Provinsi DIY.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Rahman, 2005). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Warsito, 2001).

Kependudukan

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni.

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Luas Wilayah}}$$

Satuan kepadatan penduduk dinyatakan dalam jiwa/km². Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Semakin banyak jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah dengan luas yang sempit, maka tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut termasuk ke dalam kategori tingkat kepadatan yang tinggi. Sedangkan, apabila jumlah penduduk yang sedikit mendiami suatu wilayah yang luas, maka tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut rendah.

Kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat dibagi menjadi empat bagian (Kajian Kependudukan, 2015):

1. Kepadatan penduduk kasar (*crude density of population*) atau sering pula disebut dengan kepadatan penduduk aritmatika. Kepadatan penduduk kasar yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.
2. Kepadatan penduduk fisiologis (*physiological density*). Kepadatan Fisiologis menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah lahan yang ditanami (*cultivable land*).
3. Kepadatan penduduk agraris (*agricultural density*). Kepadatan agraris menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi wilayah *cultivable land*.
4. Kepadatan penduduk ekonomi (*economical density of population*). Kepadatan penduduk ekonomis adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan berdasarkan kapasitas produksinya.

Pertumbuhan Ekonomi

Prof. Simon Kuznet, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukan (Jhingan, 2012). Sedangkan Sadono Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2011). Pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dilihat dari PDB suatu negara atau PDRB suatu wilayah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi merupakan persentase perubahan naik turunnya pendapatan riil atau produk domestik regional bruto dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, jika laju pertumbuhan ekonomi stabil dan terus merangkak naik maka dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian sedang baik begitupun sebaliknya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi adalah:

$$\text{LPE} = \frac{(\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1})}{(\text{PDRBt-1})} \times 100\%$$

Keterangan:

LPE = laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen (%)

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun tertentu

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

UNDP (*United Nations Development Programme*), memberikan pengertian bahwa indeks pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dapat dipahami dari sudut manusianya bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report, 2008*), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
2. Pembangunan dimaksudkan tersebut untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia menfokuskan perhatiannya bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

Hipotesis

Dari rumusan masalah yang terdapat pada bab 1, maka ditentukan hipotesis sebagai berikut:

HA1: Diduga terdapat pengaruh antara variabel Kepadatan Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

HA2: Diduga terdapat pengaruh antara variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

HA3: Diduga terdapat pengaruh antara variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menjelaskan suatu permasalahan yang ada berdasarkan data sekunder, jurnal artikel dan lain lain dalam penelitian ini juga menggunakan data dalam bentuk satuan, ukuran, dan biasanya berupa angka. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data panel pada periode 2013-2022(10 Tahun). Data panel merupakan perpaduan antara data *time series* dan juga data *cross section* yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten/Kota Provinsi DIY.

Pada penelitian ini definisi oprasionalnya adalah:

1. Variabel Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk adalah. Dalam penelitian ini, data Jumlah Penduduk yang digunakan diterima oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY tahun 2016-2022 yang telah disusun dan dipublikasikan.

2. Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi yaitu peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu dan proses kenaikan input perkapita terus menerus dalam jangka panjang yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, semakin tinggi Laju Pertumbuhan Ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2013-2022 yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY yang telah disusun dan di publikasikan.

3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) yaitu suatu ukuran yang didasarkan pada harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM dipergunakan untuk melakukan klasifikasi apakah suatu negara merupakan negara maju, negara berkembang ataupun negara terbelakang dan dapat juga dipergunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dalam penelitian ini, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY tahun 2013-2022 yang telah disusun dan dipublikasikan.

4. Variabel Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 285 ayat (1), peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 21 ayat (1) dan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 26 ayat (1).

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda data panel dengan bantuan program Eviews 9. Data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dengan data *time series*. Regresi linier berganda merupakan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Suadnyani & Darsana, 2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepadatan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2022. Bentuk model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 KP_{it} + \beta_2 LPE_{it} + \beta_3 IPM_{it} + e_{it}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Chow test

Uji ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikan (kurang dari 5%) maka model yang terpilih adalah estimasi *Fixed Effect Model*, sebaliknya apabila nilai probabilitasnya tidak signifikan (lebih besar dari 5%) maka model yang terpilih adalah estimasi *Common Effect Model*. Dari hasil regresi yang dilakukan untuk membandingkan model terbaik *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model* diperoleh hasil estimasi Uji Chow sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	17.124936	4,42	0.0000

Berdasarkan hasil uji chow menggunakan software *Eviews 9*, nilai probabilitas F adalah $0,0000 < 0,05$ yang artinya model yang terpilih pada uji ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan antara model FEM dengan model REM diperlukan Uji Hausman.

Hausman Test

Uji Hausman merupakan langkah selanjutnya dalam menentukan model antara *Fixed Effect Model*(FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Ketentuan Uji Hausman ini dengan melihat nilai probabilitas Cross-section random, apabila nilai probabilitas $> \alpha(0.05)$ maka artinya model yang

terpilih adalah *Random Effect Model*. Begitu pula sebaliknya jika nilai probabilitas $< \alpha(0.05)$ maka artinya model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 2
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq.d.f	Prob.
Cross-section random	9.891699	3	0.0195

Berdasarkan hasil uji hausman menggunakan *software Eviews 9*, nilai probabilitas sebesar $0,0195 < 0,05$ yang artinya berdasarkan hasil estimasi pengujian uji chow dan uji hausman, maka model yang terpilih untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

HASIL ESTIMASI

Tabel 3
Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.82E+09	4.38E+08	-8.719326	0.0000
X1	76430.59	24709.62	3.093151	0.0035
X2	-1172125.	3066720.	-0.382208	0.7042
X3	51238315	5717672.	8.961394	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.926154	Mean dependent var	4.96E+08	
Adjusted R-squared	0.913847	S.D. dependent var	2.42E+08	
S.E. of regression	74730367	Sum squared resid	2.35E+17	
F-statistic	75.25046	Durbin-Watson stat	1.229771	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.905547	Mean dependent var	4.37E+08	
Sum squared resid	2.80E+17	Durbin-Watson stat	1.018761	

Berdasarkan hasil estimasi FEM pada tabel 3 maka pada regresi data panel diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 KP_{it} + \beta_2 LPE_{it} + \beta_3 IPM_{it} + e_{it}$$

$$PAD_{it} = -3,82E+09 + 76430,59 KP_{it} - 1172125 LPE_{it} + 51238315 IPM_{it} + e_{it}$$

Adapun hasil interpretasi dari persamaan regresi data panel tersebut sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar $-3,82E+09$ menunjukkan bahwa variabel KP, LPE, IPM maka Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DIY turun sebesar 3,82 persen.
2. Nilai koefisien KP sebesar 76430.59 yang berpengaruh positif signifikan artinya setiap Kepadatan Penduduk naik 1 persen maka PAD akan naik sebesar 7,6 persen.

3. Nilai koefisien LPE sebesar -1172125 yang berpengaruh negatif artinya setiap LPE naik 1 persen maka PAD akan turun sebesar 1,17 persen.
4. Nilai koefisien IPM sebesar 51238315 yang berpengaruh positif signifikan artinya setiap IPM naik 1 persen maka PAD akan naik sebesar 5,12 persen.

Persamaan kemudian diuji melalui deteksi asumsi klasik yang meliputi:

1. Deteksi Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual berdistribusi normal dengan melihat nilai *jarque bera* pada taraf signifikansi 5 persen.
2. Deteksi Multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dengan melihat nilai VIF (*variance inflation factor*). Jika nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas, namun jika nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas.
3. Deteksi Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dengan menggunakan Uji White. Data terkena heteroskedastisitas apabila semua variabel independen memiliki nilai *Obs*R-squared* < alpha ($\alpha = 0,05$).
4. Deteksi Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Jika nilai p value uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM* > 0,05 maka model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi serial begitu sebaliknya.

Setelah deteksi asumsi klasik maka dilakukan uji koefisien regresi meliputi:

1. Pengujian secara parsial (uji T) digunakan untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel independen secara individu (parsial) terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan.
2. Pengujian secara serempak (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu penawaran tembakau kepada tengkulak.
3. Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan serta pengujian hipotesis, maka tujuan dalam penelitian ini telah dicapai dan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Kepadatan Penduduk mempunyai hasil positif dan signifikan dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dengan nilai koefisien β sebesar 0,076 yang artinya apabila Kepadatan Penduduk meningkat 1% dan ceteris paribus maka variabel Pendapatan Asli Daerah akan meningkat 0,076%.
2. Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi mempunyai hasil negatif dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dengan nilai koefisien β sebesar -1,172 yang artinya apabila Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat 1% dan ceteris paribus maka variabel Pendapatan Asli Daerah akan menurun 1,172%.
3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia mempunyai hasil positif dan signifikan dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dengan nilai koefisien β sebesar 51,238 yang artinya apabila Indeks Pembangunan Manusia meningkat 1% dan ceteris paribus maka variabel Pendapatan Asli Daerah akan meningkat 5,12%.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang diambil, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi DIY jika ingin lebih meningkatkan PAD tidak hanya memusatkan kegiatan otonomi dan perekonomian di pusat Kota Yogyakarta, sebaiknya ke daerah yang baru berkembang

seperti Gunungkidul dan Kulonprogo agar tidak terjadi lonjakan kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang pada akhirnya akan menimbulkan gejala/masalah sosial di DIY.

2. Pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja melalui program-program pendidikan maupun pelatihan ketenagakerjaan agar tercipta tingkat IPM yang tinggi sebagai penunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penawaran tembakau dari petani kepada tengkulak di Desa Tuksari tahun 2023 secara bersama-sama dipengaruhi oleh harga tembakau, pengeluaran konsumsi rumah tangga, luas lahan, dan biaya produksi. Peningkatan harga tidak berpengaruh terhadap kuantitas tembakau yang ditawarkan petani kepada tengkulak. Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga petani secara signifikan dapat meningkatkan kuantitas tembakau yang ditawarkan petani kepada tengkulak. Peningkatan luas lahan secara signifikan dapat meningkatkan kuantitas tembakau yang ditawarkan petani kepada tengkulak. Peningkatan biaya produksi secara signifikan dapat meningkatkan kuantitas tembakau yang ditawarkan petani kepada tengkulak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, W. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ekonosia.
- Alisyahbana, I. (1980). *Teknologi dan Perkembangan*. Jakarta: Yayasan Idayu .
- Amalia, F., & Purbadharmaja, I. B. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Ardiansyah, & Widyaningsih. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Jawa Tengah. *Simposium Nasional Akuntansi 17*.
- Beik, I. S. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Boediono. (1985). *Ekonomi Makro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi no 2*. Yogyakarta : Penerbit BPFE .
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM Yogyakarta.
- Fajar, M. (2008). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7*. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2011). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herlina, R. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : Arif Grosita.
- Husen, A. (2010). *Manajemen Proyek (Perencanaan, Penjadwalan & Pengendalian Proyek)*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahrany, Y. (2012). Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan. *Ilmu Ekonomi*.
- Maimunah, M., & Akbar, R. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *The Indonesian Journal of Accounting Research*.
- Mankiw, G. N. (2003). *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mankiw, G. N. (2015). *Principles of Economics*. Massachusetts: Cengage Learning.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Ranis, G., Stewart, F., & Ramirez, A. (2000). Economic Growth and Human Development. *World Development, Vol. 28, No. 2*.
- Setyowati, & Suparwati. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi Vol. 9 No. 1*.

- Sukirno, S. (1997). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Edisi 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2016). *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syamsuddin. (2013). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.